



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950
No.Telp 021-22859672 ; Website : www.ptun-jakarta.go.id ; E-mail : ptun.jakarta@gmail.com

Nomor : 3556/KPTUN.W2.TUN1/PW1.1.1/X/2026 Jakarta, 05 Oktober 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Surat Pengantar Laporan Bulanan
Bulan September 2026

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Di –
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bersama ini kami sampaikan berkas laporan bulanan bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk periode September 2026.

Berkas laporan ini sebagai bahan evaluasi dan monitoring guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian disampaikan untuk menjadikan pemeriksaan. Atas perhatian dan kerja sama, kami ucapkan terima kasih.



KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik

DANAN PRIAMBADA



Tembusan :
1. Arsip





**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA**



LAPORAN BULANAN SEPTEMBER

2026

(021) 22859672

www.ptun-jakarta.go.id

**Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo
Gebang, Jakarta Timur, 13950**

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Jenis Laporan	1
 BAB II. PELAKSANAAN TUGAS	2
A. Kesekretariatan	2
B. Kepaniteraan	17
 BAB III. TELAAHAN	28
 BAB IV. KESIMPULAN, USUL DAN SARAN	29



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Februari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Bulanan ini merupakan kumpulan dari masing – masing Sub Bagian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga di maksud pula sebagai bahan informasi penyempurnaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

C. JENIS LAPORAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Jenis Laporan meliputi bidang Kesekretariatan, bidang Kepaniteraan dan bidang lainnya sebagai berikut :

1. Kesekretariatan :

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

2. Kepaniteraan :

- Kepaniteraan Perkara
- Kepaniteraan Hukum



BAB II

PELAKSANAAN TUGAS

A. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Saprasi di lingkungan PTUN Jakarta.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :



- SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

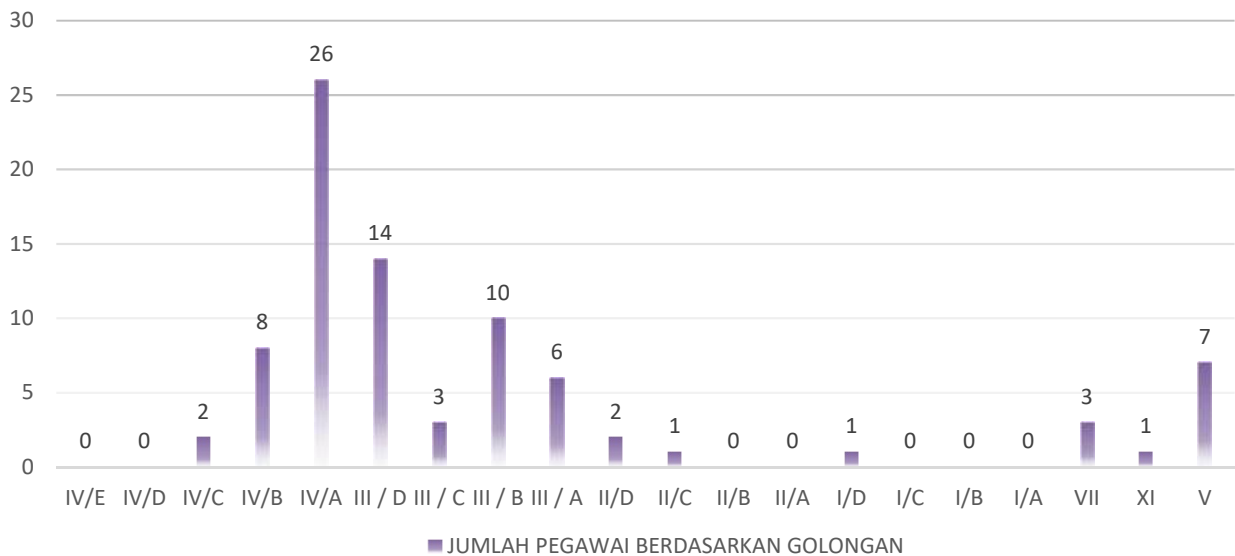
a. Jumlah Pegawai

Jumlah Seluruh Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 September 2026 adalah 21 orang Hakim, 52 orang PNS, 11 orang PPPK yang terdiri dari Laki-laki yang berjumlah 52 Orang dan Perempuan 32 Orang, adapun rinciannya sebagai berikut:



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



Mutasi

Mutasi Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
-				

Mutasi Keluar Wilayah

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
-				

DATA HAKIM / PEGAWAI BARU:

NO	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN	KET
-				



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

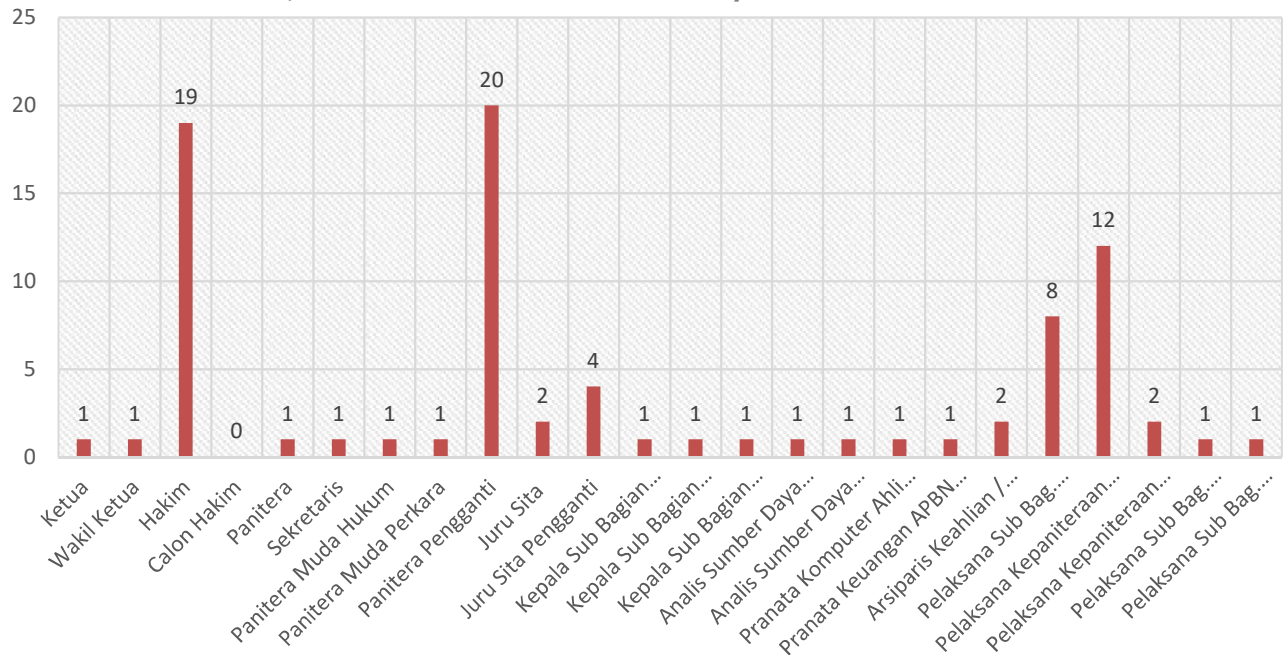
PELANTIKAN / PENGANGKATAN JABATAN BARU

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
-				



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JABATAN FUNGSIONAL / STRUKTURAL



KEPEGAWAIAN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

a. Umum

1. Tata Persuratan :

Surat Masuk

No.	SUB. BAGIAN	SURAT MASUK				JUMLAH
		DARI	BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	PERSURATAN	Mahkamah Agung RI	2	–	–	2
2		PTTUN Jakarta	0	–	–	0
3		BALITBANG DIKLAT KUMDIL	1	–	–	1
4		Dirjen Badimiltun	7	–	–	7
5		Komisi Yudisial	0	–	0	0
6		Perkara / Lain-lain	102	–	–	102
7		Umum / Lain-lain	32	–	–	32
TOTAL						144

Surat Keluar

NO	SUB	SURAT			JUMLAH
		BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	Sub Bagian Kepegawaian dan Otala	85	0	0	85
2	Sub Bagian Umum dan Keuangan	46	0	0	46
3	Sub Perencanaa IT,Pelaporan	6	0	0	6
4	Kepaniteraan Muda Perkara	71	0	0	71
5	Kepaniteraan Muda Hukum	35	0	0	35
6	Lain - Lain	0	0	0	0
TOTAL					243

2) Tata Kearsipan :

Arsip - arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertata dengan tertib melalui media penyimpanan, seperti file Ordner, Rak Arsip, Lemari Besi dan Arsip Data Komputer (ADK) sehingga memudahkan dalam pencarian.

3) Inventaris dan Persediaan :

Inventaris dan persediaan kantor dikelola dan di bukukan sesuai petunjuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yakni menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan aplikasi Persediaan.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Untuk bulan September Tahun 2026 aset Inventaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pengadaan barang / jasa sebagai berikut:

No	Nama Barang	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Jumlah
1	A.C. Split	4		28	32
2	Acces Point	5			5
3	Air Conditioning (AC)	18			18
4	Amplifier			3	3
5	Asbak Tinggi			1	1
6	Audio Mixing Console	1			1
7	Bangku Panjang Besi/Metal	7		17	24
8	Bracket Standing Peralatan	8			8
9	Brandkas			1	1
10	Buffet			1	1
11	Buku Lainnya	18			18
12	Camera Conference	1			1
13	Camera Digital	2			2
14	CCTV - Camera Control Television System	26			26
15	Digital LED Running Text	1			1
16	Dispenser	7			7
17	Facsimile	2			2
18	Filing Cabinet Besi	41		1	42
19	Filing Sealing	73			73
20	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	4			4
21	Gedung Pos Jaga Permanen	1			1
22	Genset	1			1
23	Jam Mekanis			6	6
24	Kipas Angin		3		3
25	Komponen/Alat Pengolah Data	26			26
26	Komputer Jaringan Lainnya	29			29
27	Kursi Besi/Metal	606		1	607
28	Kursi Kayu	55		14	69
29	Lambang Garuda Pancasila	6			6
30	Lambang Instansi	7			7
31	Lap Top	9			9
32	Layar Film/Projector	1			1
33	LCD Monitor	1			1
34	LCD Projector/Infocus	1			1
35	Lemari Besi/Metal	17	8	7	32
36	Lemari Kayu	2		22	24
37	Lemari Penyimpan	35			35
38	Loudspeaker	4		5	9
39	Meja Kerja Kayu	173		28	201
40	Meja Komputer			3	3
41	Meja Makan Besi	5			5
42	Meja Rapat	39			39
43	Meja Resepsionis	1		1	2
44	Mesin Absensi	1			1



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

45	Mesin Antrian	2			2
46	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1			1
47	Microphone	13			13
48	Microphone/Wireless MIC	1			1
49	Mimbar/Podium	1			1
50	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1			1
51	Mixer	3			3
52	Mixer Sound Sistem	1			1
53	Modem	1			1
54	Monografi	2			2
55	Movitex Board	1			1
56	Note Book	23			23
57	P.C Unit	42			42
58	Palu Sidang	1		5	6
59	Panggung	2			2
60	Papan Gambar	1			1
61	Papan Pengumuman	6			6
62	Peralatan Komputer Lainnya	2			2
63	Perkakas Kantor Lainnya	10			10
64	Pesawat Telephone	18		24	42
65	Piagam	3			3
66	Piala	12			12
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29		10	39
68	Public Address Branch Exchange (PABX)	1			1
69	Rak Besi	134		22	156
70	Rak Server	1			1
71	Router	5			5
72	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen		2		2
73	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		2	2	4
74	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8			8
75	Sedan	2		1	3
76	Sepeda Motor	7	1		8
77	Server	3			3
78	Sofa	27			27
79	Software Komputer		4		4
80	Sound System	1			1
81	Stempel Timbul/Bulat	1			1
82	Tabung Pemadam Api	9			9
83	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1			1
84	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4			4
85	Tangga Aluminium	1			1
86	Telepon Digital	4			4
87	Televisi			1	1
88	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1		1	2
89	Wireless	1			1
90	Workstation	1			1
Total		1626	20	205	1851



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

4) Perpustakaan :

Untuk Bulan September 2026 Perpustakaan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada penerimaan buku atau majalah yang masuk.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

b. Keuangan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode September 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	40,801,837,000	0	30,865,512,432	2,323,220,052	33,188,732,484	81.34 %	7,613,104,516
WA Program Dukungan Manajemen	40,801,837,000	0	30,865,512,432	2,323,220,052	33,188,732,484	81.34 %	7,613,104,516
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
EBB.951 Layanan Sarana Internal	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
053.0A Pengadaan Meubelair	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
000001. Pengadaan Meja dan Kursi CPNS	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	40,761,837,000	0	30,845,512,432	2,323,220,052	33,168,732,484	81.33 %	7,613,104,516
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	40,761,537,000	0	30,845,361,432	2,323,220,052	33,168,581,484	81.33 %	7,612,955,516
EBA.962 Layanan Umum	1,440,000	0	1,400,000	0	1,400,000	97.22 %	40,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,440,000	0	1,400,000	0	1,400,000	97.22 %	40,000
005.0A Layanan Sarana Dan Prasarana Internal Ekstrakomptabel	1,440,000	0	1,400,000	0	1,400,000	97.22 %	40,000
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000	0	1,400,000	0	1,400,000	97.22 %	40,000
000097. Printer	1,440,000	0	1,400,000	0	1,400,000	97.22 %	40,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	40,760,097,000	0	30,843,961,432	2,323,220,052	33,167,181,484	81.33 %	7,612,915,516
001 Gaji dan Tunjangan	35,293,269,000	0	27,283,204,993	2,131,878,528	29,415,083,521	83.34 %	5,878,185,479
001.0A GAJI DAN TUNJANGAN	35,293,269,000	0	27,283,204,993	2,131,878,528	29,415,083,521	83.34 %	5,878,185,479
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	4,373,990,000	0	3,386,370,800	309,739,200	3,696,110,000	84.50 %	677,880,000
000002. Belanja Gaji Pokok PNS	423,548,000	0	1,240,340,300	0	1,240,340,300	292.85	-816,792,300
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14)	2,000	0	307,289,300	0	307,289,300	15,364	-307,287,300
000004. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13)	323,873,000	0	0	0	0	0.00 %	323,873,000
000102. Belanja Gaji Pokok PNS (BA BUN)	3,626,567,000	0	1,838,741,200	309,739,200	2,148,480,400	59.24 %	1,478,086,600
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	60,000	0	38,684	3,329	42,013	70.02 %	17,987
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,000	0	31,624	3,329	34,953	69.91 %	15,047

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode September 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)	5,000	0	3,424	0	3,424	68.48 %	1,576
000007. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	5,000	0	3,636	0	3,636	72.72 %	1,364
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	367,458,000	0	257,642,626	22,743,250	280,385,876	76.30 %	87,072,124
000008. Belanja Tunjangan Suamistri PNS	314,964,000	0	210,731,480	22,743,250	233,474,730	74.13 %	81,489,270
000009. Belanja Tunjangan Suamistri PNS (Gaji ke 13)	26,247,000	0	23,290,458	0	23,290,458	88.74 %	2,956,542
000010. Belanja Tunjangan Suamistri PNS (Gaji ke 14)	26,247,000	0	23,620,688	0	23,620,688	89.99 %	2,626,312
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	118,370,000	0	87,848,318	8,163,344	96,011,662	81.11 %	22,358,338
000011. Belanja Tunjangan Anak PNS	101,460,000	0	72,008,644	8,163,344	80,171,988	79.02 %	21,288,012
000012. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13)	8,455,000	0	7,915,718	0	7,915,718	93.62 %	539,282
000013. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 14)	8,495,000	0	7,923,896	0	7,923,896	93.72 %	531,044
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	43,200,000	0	21,600,000	2,600,000	24,200,000	56.02 %	19,000,000
000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS	37,440,000	0	17,100,000	2,600,000	19,700,000	52.62 %	17,740,000
000015. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	2,880,000	0	1,620,000	0	1,620,000	56.25 %	1,260,000
000016. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	190,337,000	0	149,955,000	16,288,000	166,243,000	87.34 %	24,094,000
000017. Belanja Tunj. Fungsional PNS	163,200,000	0	123,175,000	16,288,000	139,463,000	85.46 %	23,737,000
000018. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	13,600,000	0	13,390,000	0	13,390,000	98.46 %	210,000
000019. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	13,537,000	0	13,390,000	0	13,390,000	98.91 %	147,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	140,000,000	0	22,457,333	293,436	22,750,769	16.25 %	117,249,231
000020. Belanja Tunj. PPh. PNS	120,000,000	0	1,082,280	293,436	1,375,716	1.15 %	118,624,284
000021. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	10,000,000	0	10,998,506	0	10,998,506	109.99	-998,506
000022. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	10,000,000	0	10,376,547	0	10,376,547	103.77	-376,547
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	257,525,000	0	177,791,100	16,149,660	193,940,760	75.31 %	63,584,240
000023. Belanja Tunj. Beras PNS	257,525,000	0	177,791,100	16,149,660	193,940,760	75.31 %	63,584,240
511129 Belanja Uang Makan PNS	889,741,000	0	396,493,000	49,640,000	446,133,000	50.14 %	443,608,000
000024. Gol IV (29 org x 22 hr x 12 Bln)	308,965,000	0	199,014,000	25,502,000	224,516,000	72.67 %	84,449,000
000025. Gol III (60 org x 22 Hr x 12 Bln)	480,730,000	0	175,639,000	21,793,000	197,432,000	41.07 %	283,298,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Halaman 10 dari 28 halaman

Laporan Bulanan Bulan September 2026 PTUN JAKARTA
Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pel



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode September 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 3 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000026. Gol II (10 org x 22 Hr x 12 Bln)	90,951,000	0	16,835,000	1,785,000	18,620,000	20.47 %	72,331,000
000027. Gol I (1 org x 22 Hr x 12 Bln)	9,095,000	0	5,005,000	560,000	5,565,000	61.19 %	3,530,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	73,654,000	0	30,160,000	2,570,000	32,730,000	44.44 %	40,924,000
000028. Belanja Tunjangan Umum PNS	63,845,000	0	24,640,000	2,570,000	27,210,000	42.62 %	36,635,000
000029. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	4,902,000	0	2,760,000	0	2,760,000	56.30 %	2,142,000
000030. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	4,907,000	0	2,760,000	0	2,760,000	56.25 %	2,147,000
511324 Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	5,459,313,000	0	4,552,152,611	307,615,464	4,859,768,075	89.02 %	599,544,925
000031. Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	1,208,703,000	0	1,050,684,765	0	1,050,684,765	86.93 %	158,018,235
000032. Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara (gaji ke 13)	177,014,000	0	0	0	0	0.00 %	177,014,000
000033. Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara (gaji ke 14)	410,000,000	0	471,166,656	0	471,166,656	114.92 %	-61,166,656
000103. Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara (BA BUN)	3,663,596,000	0	3,030,301,190	307,615,464	3,337,916,654	91.11 %	325,679,346
511339 Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	23,225,500,000	0	17,783,900,000	1,353,800,000	19,137,700,000	82.40 %	4,087,800,000
000034. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	8,394,845,000	0	4,840,600,000	1,293,100,000	6,133,700,000	73.07 %	2,261,145,000
000035. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (gaji ke 13)	531,100,000	0	0	0	0	0.00 %	531,100,000
000036. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (gaji ke 14)	2,021,600,000	0	1,409,500,000	0	1,409,500,000	69.72 %	612,100,000
000104. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (BA BUN)	9,635,255,000	0	9,003,300,000	60,700,000	9,064,000,000	94.07 %	571,255,000
000105. Tunggakan Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (BA BUN)	2,642,700,000	0	2,530,500,000	0	2,530,500,000	95.75 %	112,200,000
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	39,600,000	0	304,356,425	29,727,700	334,084,125	843.65 %	-294,484,125
000037. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	2,859,000	0	16,199,650	0	16,199,650	566.62 %	-13,340,650
000038. Belanja Gaji Pokok PPPK	33,882,000	0	265,331,700	29,727,700	295,059,400	870.84 %	-261,177,400
000039. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	2,859,000	0	22,825,075	0	22,825,075	798.36 %	-19,966,075
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,000	0	9,415	895	10,310	147.29 %	-3,310
000040. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1,000	0	721	0	721	72.10 %	279
000041. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1,000	0	439	0	439	43.90 %	561
000042. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	0	8,255	895	9,150	183.00 %	-4,150

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode September 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,704,000	0	13,948,701	1,371,570	15,320,271	413.61 %	-11,616,271
000043. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 13)	264,000	0	1,019,766	0	1,019,766	386.28 %	-755,766
000044. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,176,000	0	12,249,090	1,371,570	13,620,660	428.86 %	-10,444,660
000045. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 14)	264,000	0	679,845	0	679,845	257.52 %	-415,845
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,456,000	0	3,234,705	318,440	3,553,145	244.03 %	-2,097,145
000046. Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,250,000	0	2,840,616	318,440	3,159,056	252.72 %	-1,909,056
000047. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	103,000	0	236,453	0	236,453	229.57 %	-133,453
000048. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	103,000	0	157,636	0	157,636	153.04 %	-54,636
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,900,000	0	3,850,000	350,000	4,200,000	85.71 %	700,000
000049. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,200,000	0	3,150,000	350,000	3,500,000	83.33 %	700,000
000050. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00 %	0
000051. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00 %	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,044,000	0	16,385,025	1,593,240	17,978,265	444.57 %	-13,934,265
000052. Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,466,000	0	14,339,160	1,593,240	15,932,400	459.68 %	-12,466,400
000053. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13)	289,000	0	1,213,035	0	1,213,035	419.74 %	-924,035
000054. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	289,000	0	832,830	0	832,830	288.18 %	-543,830
511628 Belanja Uang Makan PPPK	100,400,000	0	56,510,000	7,106,000	63,616,000	63.36 %	36,784,000
000055. Belanja Uang Makan PPPK	100,400,000	0	56,510,000	7,106,000	63,616,000	63.36 %	36,784,000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	10,000	0	18,501,250	1,805,000	20,306,250	203.062 %	-20,296,250
000056. Belanja Tunjangan Umum PPPK	10,000	0	18,501,250	1,805,000	20,306,250	203.062 %	-20,296,250
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5,486,828,000	0	3,560,756,439	191,341,524	3,752,097,963	68.38 %	1,734,730,037
002.0A Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	1,654,646,000	0	1,474,363,566	27,053,862	1,501,417,428	90.74 %	153,228,572
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1,574,646,000	0	1,429,507,014	25,145,000	1,454,652,014	92.38 %	119,993,986
000057. Petugas Kebersihan	654,576,000	0	654,576,000	0	654,576,000	100.00 %	0
000058. Satpam	720,096,000	0	720,096,000	0	720,096,000	100.00 %	0
000059. Tambahan Satpam (1 Orang x 8 Bulan)	55,392,000	0	2,768,400	0	2,768,400	5.00 %	52,623,600
000101. Air minum Kemasan / Galon	6,000,000	0	2,780,000	400,000	3,180,000	53.00 %	2,820,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode September 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000106. Retribusi Sampah	9,000,000	0	5,400,000	1,250,000	6,650,000	73.89 %	2,350,000
000109. Keperluan sehari-hari Perkantoran	74,190,000	0	43,886,614	23,495,000	67,381,614	90.82 %	6,808,386
000111. Pengemudi (1 Orang x 8 Bulan)	55,392,000	0	0	0	0	0.00 %	55,392,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	80,000,000	0	44,856,552	1,908,862	46,765,414	58.46 %	33,234,586
000060. Biaya perkantoran sehari-hari (91 Org)	80,000,000	0	44,856,552	1,908,862	46,765,414	58.46 %	33,234,586
002.0B LANGGANAN DAYA JASA	1,097,241,000	0	772,926,249	78,533,530	851,459,779	77.60 %	245,781,221
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	185,600,000	0	184,151,188	336,896	184,488,084	99.40 %	1,111,916
000061. Langganan Internet	181,600,000	0	181,500,000	0	181,500,000	99.94 %	100,000
000062. Lisensi Video Conference	4,000,000	0	2,651,188	336,896	2,988,084	74.70 %	1,011,916
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,200,000	0	3,140,500	400,000	3,540,500	84.30 %	659,500
000063. Biaya Pengiriman Surat Dinas	4,200,000	0	3,140,500	400,000	3,540,500	84.30 %	659,500
522111 Belanja Langganan Listrik	875,291,000	0	557,674,861	77,796,634	635,471,495	72.60 %	239,819,505
000064. Belanja Langganan Listrik	875,291,000	0	557,674,861	77,796,634	635,471,495	72.60 %	239,819,505
522112 Belanja Langganan Telepon	6,000,000	0	1,983,700	0	1,983,700	33.06 %	4,016,300
000065. Langganan Telephone	6,000,000	0	1,983,700	0	1,983,700	33.06 %	4,016,300
522113 Belanja Langganan Air	150,000	0	0	0	0	0.00 %	150,000
000066. Langganan Ar	150,000	0	0	0	0	0.00 %	150,000
522141 Belanja Sewa	26,000,000	0	25,976,000	0	25,976,000	99.91 %	24,000
000067. Langganan Web Hosting	26,000,000	0	25,976,000	0	25,976,000	99.91 %	24,000
002.0C Pemeliharaan Kantor	1,504,501,000	0	678,614,180	31,814,132	710,428,312	47.22 %	794,072,688
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	905,993,000	0	452,315,559	7,100,000	459,415,559	50.71 %	446,577,441
000068. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan	905,993,000	0	452,315,559	7,100,000	459,415,559	50.71 %	446,577,441
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	42,750,000	0	2,500,000	0	2,500,000	5.85 %	40,250,000
000069. Pemeliharaan Rumah Dinas (4 Unit)	42,750,000	0	2,500,000	0	2,500,000	5.85 %	40,250,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	555,758,000	0	223,798,621	24,714,132	248,512,753	44.72 %	307,245,247
000070. Pemeliharaan Lift	57,000,000	0	51,948,000	0	51,948,000	91.14 %	5,052,000
000071. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas	19,000,000	0	16,730,566	1,610,240	18,340,806	96.53 %	659,194

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode September 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 6 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Pejabat	19,000,000	0	16,730,566	1,610,240			659,194
000072. Pemeliharaan AC Cassete	83,076,000	0	72,178,330	0	72,178,330	86.88 %	10,897,670
000073. Pemeliharaan Laptop	15,257,000	0	810,200	0	810,200	5.31 %	14,446,800
000074. Pemeliharaan PC	29,820,000	0	3,683,620	0	3,683,620	12.36 %	26,136,480
000075. Pemeliharaan Printer	19,665,000	0	4,397,500	8,254,138	12,651,638	64.34 %	7,013,362
000076. Pemeliharaan AC Split	36,708,000	0	31,066,359	0	31,066,359	84.63 %	5,641,641
000077. Pemeliharaan Mesin Pompa	82,000	0	0	0	0	0.00 %	82,000
000078. Kendaraan Roda 2	33,300,000	0	6,629,920	0	6,629,920	19.91 %	26,670,080
000079. Kendaraan Roda 4	169,700,000	0	36,354,226	13,849,754	50,203,980	29.58 %	119,496,020
000108. Pemeliharaan barang elektronik lainnya	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
000110. Pemeliharaan Peralatan Mesin	91,650,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1.09 %	90,650,000
002.0D Operasional Lainnya	203,310,000	0	44,610,000	51,340,000	95,950,000	47.19 %	107,360,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	123,750,000	0	0	44,710,000	44,710,000	36.13 %	79,040,000
000080. Pakaian Dinas Hakim 26 Org x 2 Stel	31,616,000	0	0	25,536,000	25,536,000	80.77 %	6,080,000
000081. Pakaian Dinas Pegawai 60 Org x 2 Stel	72,960,000	0	0	0	0	0.00 %	72,960,000
000082. Pakaian Dinas CPNS 4 Org x 2 Stel	5,798,000	0	0	5,798,000	5,798,000	100.00 %	0
000083. Pakaian Dinas PPPK 11 Org x 2 Stel	13,376,000	0	0	13,376,000	13,376,000	100.00 %	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	79,560,000	0	44,610,000	6,630,000	51,240,000	64.40 %	28,320,000
000084. Honor KPA	21,600,000	0	10,800,000	1,800,000	12,600,000	58.33 %	9,000,000
000085. Honor PPK	21,000,000	0	12,250,000	1,750,000	14,000,000	66.67 %	7,000,000
000086. Honor Penguji Tagihan Penandatanganan SPM	9,000,000	0	5,250,000	750,000	6,000,000	66.67 %	3,000,000
000087. Honor Bendahara Penerimaan	2,400,000	0	1,400,000	200,000	1,600,000	66.67 %	800,000
000088. Honor Bendahara Pengeluaran	7,920,000	0	4,620,000	560,000	5,280,000	66.67 %	2,640,000
000089. Honor Staf Keuangan (2 org x 12 Bln)	11,760,000	0	6,860,000	980,000	7,840,000	66.67 %	3,920,000
000090. Honor PPABP	5,680,000	0	3,430,000	490,000	3,920,000	68.67 %	1,960,000
002.0E HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM	995,280,000	0	576,900,000	2,000,000	578,900,000	58.16 %	416,380,000
522141 Belanja Sewa	995,280,000	0	576,900,000	2,000,000	578,900,000	58.16 %	416,380,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode September 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000091. Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim (10 Orang x 12 Bln)	995,280,000	0	576,900,000	2,000,000	578,900,000	58.16 %	416,380,000
002.0G Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding	31,850,000	0	13,342,444	600,000	13,942,444	43.78 %	17,907,556
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,100,000	0	11,392,444	0	11,392,444	45.39 %	13,707,556
000092. Transportasi (2 org x 1 kegiatan)	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
000093. Uang Harian (3 org x 3 hari x 1 kegiatan)	4,950,000	0	3,240,000	0	3,240,000	65.45 %	1,710,000
000094. Tiket (5 org x 1 hari x 1 kegiatan)	7,850,000	0	0	0	0	0.00 %	7,850,000
000095. Penginapan (5 org x 2 hari x 1 kegiatan)	10,500,000	0	8,152,444	0	8,152,444	77.64 %	2,347,556
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,750,000	0	1,950,000	600,000	2,550,000	37.78 %	4,200,000
000096. Perjalanan Dinas Dalam Kota (9 Org x 5 keg) termasuk Konsultasi ke KPPNKANWIL DJPbKPKNLKANWIL DJKNBKNBKD	6,750,000	0	1,950,000	600,000	2,550,000	37.78 %	4,200,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	300,000	0	151,000	0	151,000	50.33 %	149,000
EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	151,000	0	151,000	50.33 %	149,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	300,000	0	151,000	0	151,000	50.33 %	149,000
005.0A Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	151,000	0	151,000	50.33 %	149,000
521211 Belanja Bahan	300,000	0	151,000	0	151,000	50.33 %	149,000
000098. Cetak Bahan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	151,000	0	151,000	50.33 %	149,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode September 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	52,912,000	2,200,000	22,200,000	6,000,000	28,200,000	53.30 %	22,512,000
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	52,912,000	2,200,000	22,200,000	6,000,000	28,200,000	53.30 %	22,512,000
BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	52,912,000	2,200,000	22,200,000	6,000,000	28,200,000	53.30 %	22,512,000
AEA Koordinasi	15,496,000	0	5,400,000	1,830,000	7,230,000	46.66 %	8,266,000
AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara	15,496,000	0	5,400,000	1,830,000	7,230,000	46.66 %	8,266,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	15,496,000	0	5,400,000	1,830,000	7,230,000	46.66 %	8,266,000
005.0A Pelaksanaan Pengamanan Sidang	15,496,000	0	5,400,000	1,830,000	7,230,000	46.66 %	8,266,000
521211 Belanja Bahan	15,496,000	0	5,400,000	1,830,000	7,230,000	46.66 %	8,266,000
000001. Konsumsi Pengamanan Sidang (25 org x25 kali)	15,496,000	0	5,400,000	1,830,000	7,230,000	46.66 %	8,266,000
BCA Perkara Hukum Perseorangan	4,200,000	2,200,000	0	0	0	0.00 %	2,000,000
BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	4,200,000	2,200,000	0	0	0	0.00 %	2,000,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	4,200,000	2,200,000	0	0	0	0.00 %	2,000,000
005.0A Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	4,200,000	2,200,000	0	0	0	0.00 %	2,000,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,200,000	600,000	0	0	0	0.00 %	600,000
000002. Pengiriman Pemberitahuan/Panggilan	1,200,000	600,000	0	0	0	0.00 %	600,000
521211 Belanja Bahan	3,000,000	1,600,000	0	0	0	0.00 %	1,400,000
000003. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	1,000,000	400,000	0	0	0	0.00 %	600,000
000004. Alat Tulis Kantor	2,000,000	1,200,000	0	0	0	0.00 %	800,000
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	33,216,000	0	16,800,000	4,170,000	20,970,000	63.13 %	12,246,000
QBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33,216,000	0	16,800,000	4,170,000	20,970,000	63.13 %	12,246,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	33,216,000	0	16,800,000	4,170,000	20,970,000	63.13 %	12,246,000
005.0A Pos Bantuan Hukum	33,216,000	0	16,800,000	4,170,000	20,970,000	63.13 %	12,246,000
521211 Belanja Bahan	4,416,000	0	0	1,770,000	1,770,000	40.08 %	2,646,000
000005. ATK Layanan Pos Bantuan Hukum	4,416,000	0	0	1,770,000	1,770,000	40.08 %	2,646,000
522131 Belanja Jasa Konsultan	28,800,000	0	16,800,000	2,400,000	19,200,000	66.67 %	9,600,000
000006. Jasa Layanan Konsultan Hukum	28,800,000	0	16,800,000	2,400,000	19,200,000	66.67 %	9,600,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

a. Teknologi Informasi, pengelolaan website dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yaitu dengan melakukan pembaruan konten berita website yaitu dengan adanya Rapat Bulanan untuk Bulan September 2026 agenda rapat meliputi :

- Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan seluruh Aparatur Sipil Negara agar dalam pelaksanaan tugasnya selalu dilakukan secara profesional dengan tetap berpegang teguh dan berpedoman pada KEPPH, Kode Etik Kepaniteraan, Kode Etik ASN dan selanjutnya menguraikan poin-poin Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan kepada seluruh Hakim dan ASN agar selalu menjaga kebersihan di dalam ruangan kerja masing-masing, dan menginstruksikan kepada Ibu Sekretaris agar tenaga kebersihan selalu dimonitoring dan dilakukan evaluasi agar kebersihan di area terbuka atau wilayah publik pada kantor PTUN Jakarta lebih meningkat lagi.
- Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan kepada Sub Bagian Kepegawaian & Ortala, sebagai bentuk peningkatan pelayanan maka dihimbau agar menyampaikan himbauan untuk melakukan presensi pada 15 menit sebelum hadir dan 15 menit sebelum pulang melalui sarana whatsapp group kantor. Bagi bapak dan ibu yang lupa melakukan presensi hadir dan pulang namun pada praktiknya hadir tepat waktu maka dapat berkoordinasi dengan Sub Bagian PTIP untuk meminta rekaman cctv dan menyerahkan bukti tersebut ke Sub Bagian Kepegawaian & Ortala sebagai dasar pembuatan permohonan perbaikan presensi.
- Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerintahkan kepada seluruh Pejabat Struktural agar membuat surat tugas bagi bawahannya yang melakukan lembur sebagai eviden agar dapat menggantikan kekurangan jam kerja yang diwajibkan menurut peraturan perundang-



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

undangan (37,5 jam per minggu) apabila ASN tersebut terdapat keterlambatan hadir.

- Bapak Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan bahwa temuan BPK telah ditindaklanjuti dan dikirim kembali ke BPK.
- Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - Realisasi anggaran DIPA 05 sebesar 53,3% dan DIPA 01 sebesar 81,34%.
 - Renovasi PTSP akan segera dilaksanakan dan Pakaian Dinas kurang lebih 2 bulan lagi akan selesai.
- Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk segera membenahi toilet di lantai 2, dan selalu memperhatikan kebersihan terutama yang berada di area publik.
- Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan bahwa terdapat beberapa pihak yang dalam penguploadan dokumen bukti tidak dilakukan secara menyeluruh, sehingga PTUN Jakarta masih harus tetap melakukan sosialisasi kepada pihak.
- Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga berpesan kepada Panitera Pengganti untuk selalu mengingatkan Majelis Hakim agar Majelis Hakim dapat mengingatkan para pihak untuk melakukan upload bukti.

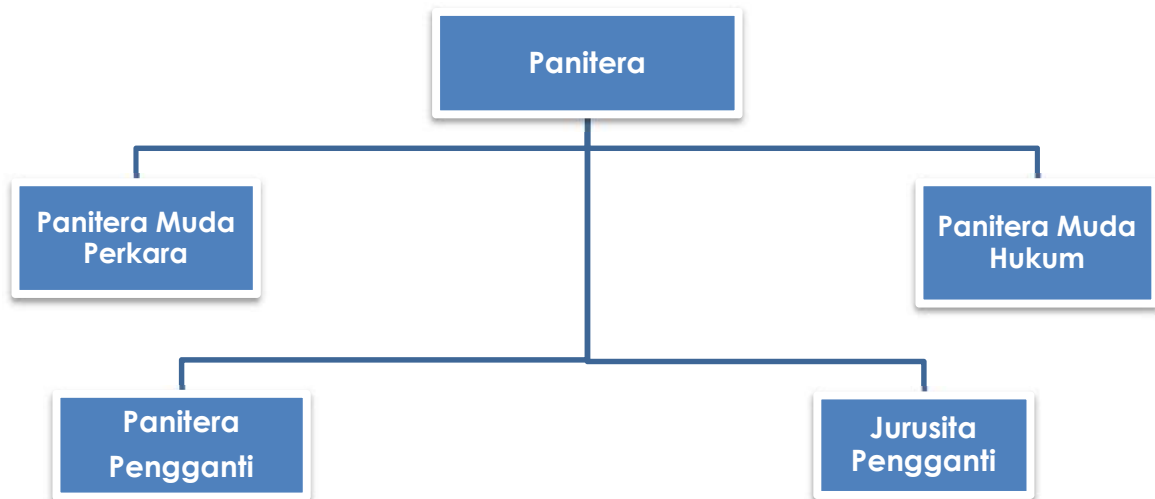
b. Pelaporan, jenis laporan yang di kerjakan pada sub bagian ini merupakan laporan yg bersifat umum pada Satuan Kerja dan laporan yang bersifat khusus terkait Kesekretariatan.



B. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Struktur Organisasi Kepaniteraan



1. Kepaniteraan Muda Perkara

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara :

- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- Meneliti berkas perkara masuk.
- Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- Memberi nomor register pada surat gugatan.
- Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- Membuat SKUM setelah bayar lunas panjer perkara di bank.
- Membuat jurnal keuangan perkara.
- Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.



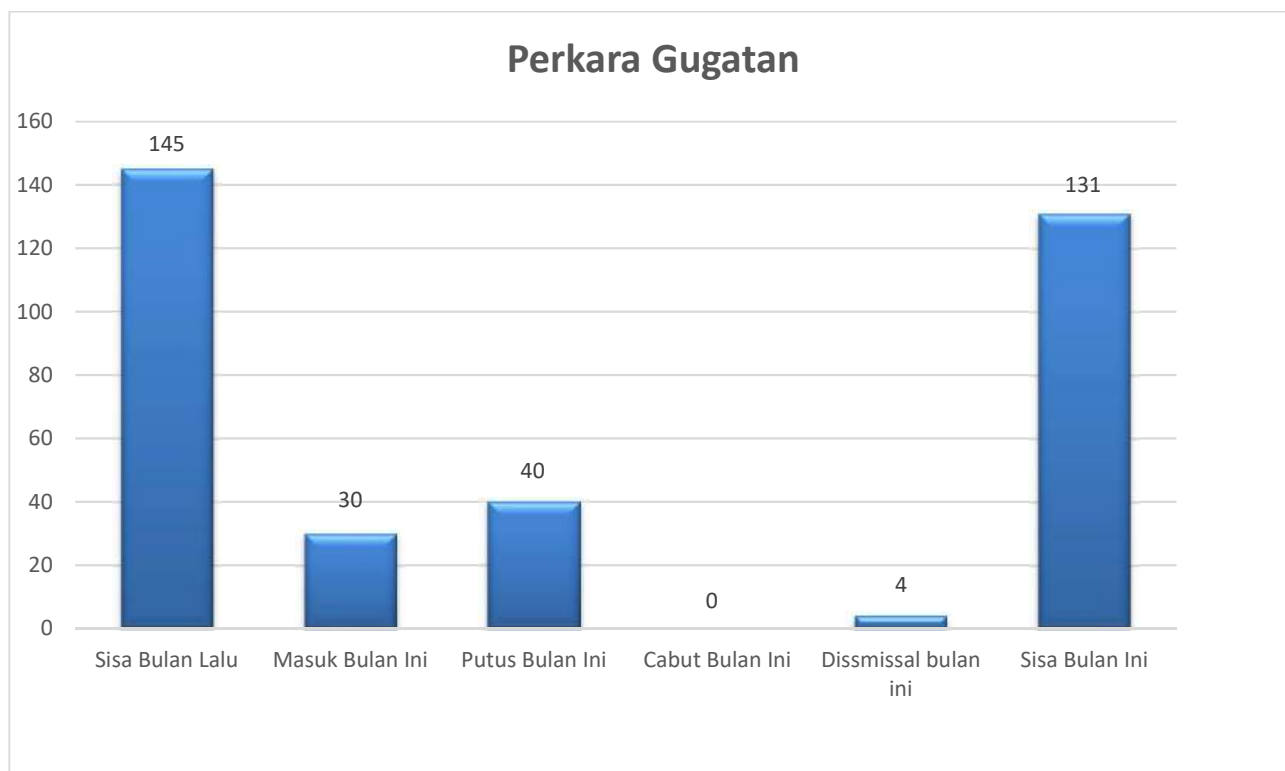
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (Inzage)
- Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- Menyerahkan arsip berkas perkara incraht kepada panmud Hukum.
- Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.
- Mengusulkan mutasi dalam rangka penyegaran dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2026.
- Membuat SKP. 2 pegawai staf pandmud perkara
- Menyusun rencana kerja panmud perkara tahun 2026



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Keadaan Perkara

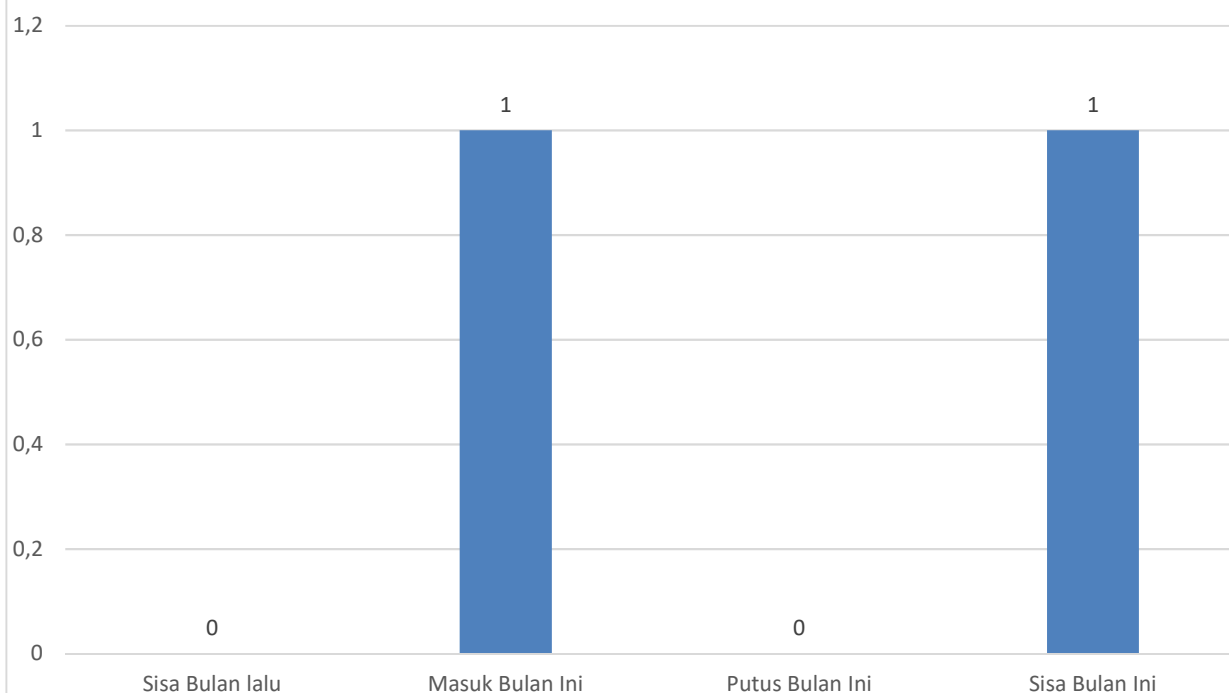


Catatan : Total Putus bulan ini adalah (di cabut + dismissal + Putus bulan ini)
 $0 + 4 + 40 = 44$ Perkara

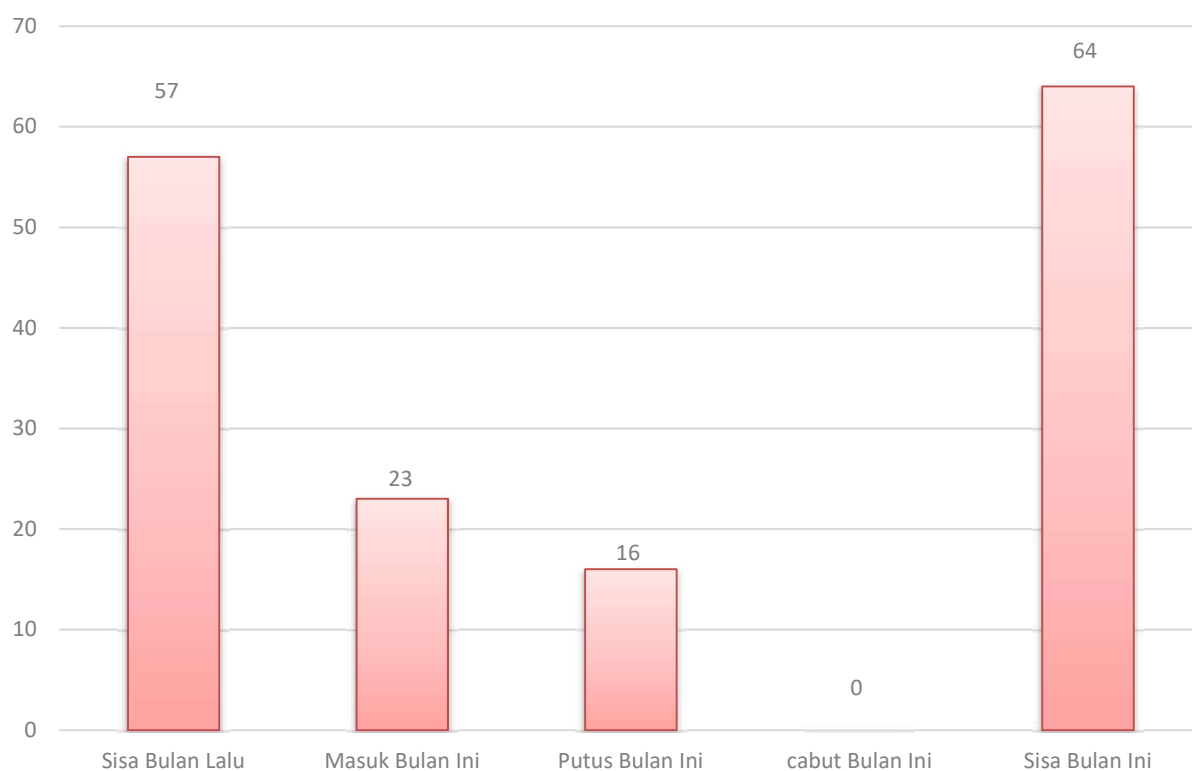


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Perlawanan

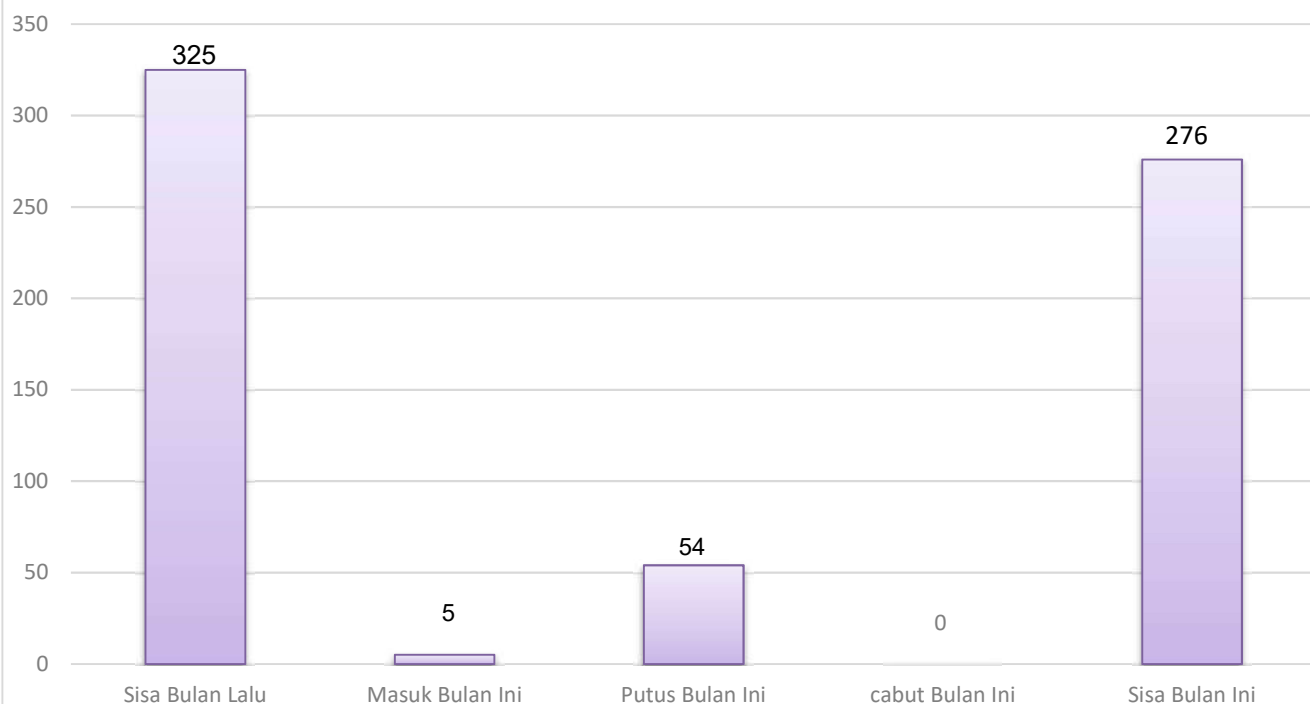


Perkara Banding



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Kasasi



C. KEGIATAN LAIN – LAIN

1. **Jakarta, 10 September 2026** - Dua orang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengikuti Uji Kompetensi dalam rangka pengisian Jabatan Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses seleksi pengisian jabatan sekaligus menjadi sarana untuk mengukur dan meningkatkan kompetensi para peserta dalam mendukung pelaksanaan tugas kepaniteraan di lingkungan Mahkamah Agung RI. Melalui pelaksanaan uji kompetensi ini, diharapkan proses pengisian jabatan dapat berjalan secara objektif, transparan, dan profesional, serta menghasilkan aparatur peradilan yang kompeten dan berintegritas guna mendukung peningkatan kualitas administrasi dan pelayanan peradilan.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

2. Jakarta, 14–15 September 2026 — Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bersama Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP) serta staf PTIP mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2027 secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan dilaksanakan dari Ruang Kerja Sekretaris PTUN Jakarta pada Senin–Selasa, 14–15 September 2026.

Rapat koordinasi membahas berbagai kebijakan dan teknis dalam penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2027, meliputi penyusunan Rencana Kerja, Pagu Alokasi, Term of Reference (TOR), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta penggunaan aplikasi BATARA dan SAKTI.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



BAB III

TELAAHAN

Kondisi Rumah Dinas

Bahwa Rumah Negara/Dinas dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang saat ini berjumlah 6 unit, dengan kondisi 2 unit dalam keadaan rusak ringan dan 4 unit kondisinya dalam keadaan tidak layak huni/memprihatinkan seperti banyaknya atap rumah yang bocor, kusen yang lapuk, lantai keramik yang retak, tembok yang rusak. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan anggaran untuk renovasi rumah dinas.

Kondisi Kendaraan Dinas

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 12 Kendaraan Dinas

1. Kendaraan roda 4 berjumlah 4 (empat) unit. Dari jumlah tersebut, 2 (dua) unit sedang dalam proses penghapusan dari daftar inventaris. Setelah proses penghapusan selesai, PTUN Jakarta akan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan kendaraan roda 4.
2. Kendaraan Roda 2 berjumlah 7 Unit, dalam kondisi rusak berat sebanyak 2 (dua) unit dan 5 (lima) unit dalam keadaan rusak ringan. Oleh karena itu PTUN Jakarta memerlukan tambahan anggaran perawatan dan terhadap 2 unit kendaraan rusak tersebut kami akan mengusulkan penghapusan dari barang milik negara sehingga PTUN Jakarta masih membutuhkan 2 unit kendaraan roda 2 (dua).
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat ini mempunyai pegawai secara keseluruhan berjumlah 73 PNS, dan 11 orang PPPK sebagian pegawai tersebut terdapat adanya jabatan rangkap, khususnya ada 3 (tiga) Panitera Pengganti dan 4 (empat) JSP yang merangkap sebagai staf pada Kepaniteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih memerlukan penambahan pegawai yang diperuntukan sebagai staf di Kepaniteraan dan Kesekretariatan.



BAB IV

KESIMPULAN, USUL DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan jalannya organisasi dan tata kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Bulan September 2026 berjalan dengan lancar.

2. USUL DAN SARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kami mengusulkan peningkatan Sumber Daya Manusia :

- Mohon agar diberikan Anggaran Biaya Tambahan untuk belanja PC All in One, Mesin Scanner, serta Mesin Printer.
- Mohon Penambahan Pegawai untuk ditempatkan di bidang Kesekretariatan dan di Kepaniteraan yang saat ini banyak di isi dari Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti).

Mengetahui



**KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**
Ditandatangani secara elektronik

DANAN PRIAMBADA



Jakarta, 05 Oktober 2026

Sekretaris,

Meilisa Lydya, S.E., M.M., S.H
NIP. 198305112009122003



Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 1 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
1		- Rumah dinas Ketua PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, serta langit-langit akan runtuh. • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		





Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 2 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
2		- Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi Rusak Ringan yang terdiri dari ; • Atap atap /plafon jebol, • Kusen yang sudah termakan rayap, • Dinding / tembok yang sudah mulai kusam dan rusak • Kaca depan rumah pecah • Pagar roboh
		
		
		
		
		



Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 3 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
3		- Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, • Kompenen penunjang lainnya rusak total • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		
		
		



Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 4 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
4		- Rumah dinas Wakil Ketua PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, • Komponen penunjang lainnya rusak seperti atap dan pagar • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekonstruksi.
		



KENDARAAN DINAS RODA 2

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
1	Honda Tiger CW 200 cc		2	Honda Supra X 125 D	
		- Honda Tiger CW 200 cc - Plat Nomor B 6017 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Berat			- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6016 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
3	Honda Supra X 125 D		4	Honda Supra X 125 D	
		- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6018 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan			- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6391 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan



No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
5	Honda Supra X 125 D		6	Honda Supra X 125 D	
		- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6392 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan			- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6393 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Berat
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
7	Honda Supra X 125 D		8	Honda Supra X 125 D	
		- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6394 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan			- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6395 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan

